



**SALINAN**

# **GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 064 TAHUN 2023

TENTANG  
PENYELENGGARAAN DAN RENCANA AKSI DAERAH  
PELAYANAN KEPEMUDAAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2022 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan dan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;  
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);  
3. Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
6. Peraturan Presiden RI Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2022 – 2026.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Daerah.
7. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kepemudaan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
9. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
10. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
11. Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan adalah koordinasi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangannya.
12. Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut RAD Pelayanan Kepemudaan adalah rencana aksi tingkat provinsi dan/ atau kabupaten/ kota berisi program serta kegiatan di bidang Kepemudaan guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.

### Pasal 2

RAD Pelayanan Kepemudaan bertujuan untuk menjadi acuan penyusunan perencanaan pembangunan pelayanan Kepemudaan bagi Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

**BAB II**  
**PENYELENGGARAAN RAD PELAYANAN KEPEMUDAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan RAD Pelayanan Kepemudaan**

**Pasal 3**

- (1) Gubernur menyusun dan menetapkan RAD Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RAN Kepemudaan.
- (4) Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

**Bagian Kedua**  
**Penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan**

**Pasal 4**

- (1) Gubernur membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. Dinas;
  - b. Biro Hukum;
  - c. Perangkat Daerah terkait; dan
  - d. Organisasi Kepemudaan.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi koordinator pelaksana Penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan.
- (4) Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

Tugas dan Fungsi Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah untuk Menyusun RAD Pelayanaan Kepemudaan dan menentukan kerangka waktu pelaksanaan kegiatan;
- b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah untuk menentukan peran masing-masing dalam Pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan;
- c. melakukan koordinasi dengan Organisasi Kepemudaan dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan terkait rancangan, Penyelenggaraan dan evaluasi RAD Pelayanan Kepemudaan;
- d. menyampaikan rancangan RAD Pelayanan Kepemudaan kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan untuk direviu, kemudian menyerahkan kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- e. menyediakan konsultasi bagi Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait Pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan dan dokumen evaluasi RAD Pelayanan Kepemudaan;
- f. menerima hasil evaluasi ketercapaian Pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan oleh Perangkat Daerah Provinsi dan menyusun hasil evaluasi sebagai bagian dari kegiatan pemantauan dan evaluasi;
- g. menyusun dan menyerahkan laporan Pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri 1 (satu) tahun sekali;
- h. melakukan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III  
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Perencanaan dan penganggaran bagi RAD Kepemudaan dilaksanakan dengan pendekatan 2 (dua) jalur, meliputi:
  - a. pengarusutamaan kebijakan umum; dan
  - b. pengarusutamaan kebijakan yang ditujukan khusus bagi Kepemudaan.

- (2) Pendekatan pengarustamaan kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses menilai dan menunjukkan dampak yang tepat dari proses perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
- (3) Pemenuhan pendanaan yang bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 7

Mekanisme Perencanaan dan penganggaran bagi RAD Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Kepemudaan;
- b. mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan;
- c. mengakomodasi kebutuhan Kepemudaan; dan
- d. meningkatkan manfaat hasil pembangunan bagi Kepemudaan.

#### Pasal 8

Integrasi kepentingan Kepemudaan dalam mekanisme Perencanaan dan penganggaran diwujudkan dalam hal:

- a. berbentuk analisis kepemudaan yang didasarkan pada kondisi dan potensi kepemudaan yang berguna untuk mendukung pembangunan Daerah; dan
- b. pelibatan Kepemudaan dalam formulasi kebijakan.

#### Pasal 9

- (1) Mekanisme perencanaan dan penganggaran bagi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diwujudkan melalui penggunaan instrumen perencanaan dan penganggaran.
- (2) Instrumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program kegiatan Perangkat Daerah terkait Kepemudaan.
- (3) Instrumen perencanaan dan penganggaran yang dimaksud pada ayat (1) yaitu pernyataan anggaran Kepemudaan.

- (4) Pernyataan anggaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari pernyataan anggaran dan strategi pelaksanaan kegiatan Kepemudaan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 10

- (1) Pernyataan anggaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b memberikan informasi bahwa suatu kegiatan dirancang Pemerintah Daerah dalam rangka Kepemudaan.
- (2) Pernyataan anggaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan informasi bahwa suatu biaya telah dialokasikan pada rincian *output* kegiatan untuk menangani permasalahan Kepemudaan.

### BAB IV

#### MEKANISME EVALUASI TERHADAP RAD PELAYANAN KEPEMUDAAN

#### Pasal 11

- (1) Dinas melakukan evaluasi terhadap Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara target capaian RAN Pelayanan Kepemudaan dan RAD Pelayanan Kepemudaan dengan:
- a. dokumen perencanaan dan penganggaran kementerian/lembaga, dan Perangkat Daerah; dan
  - b. pelaksanaan program kegiatan kementerian/lembaga, dan Perangkat Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

#### Pasal 8

- (1) Dinas melakukan evaluasi atas dokumen perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan terkait pelayanan Kepemudaan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RAD Pelayanan Kepemudaan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas bersama tim koordinasi Penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan.
- (4) Tim koordinasi penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan melalui Dinas menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dan diteruskan kepada Menteri cq. Tim Koordinasi Penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Ditetapkan di Banjarbaru  
Pada tanggal 02 Mei 2023

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 02 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,

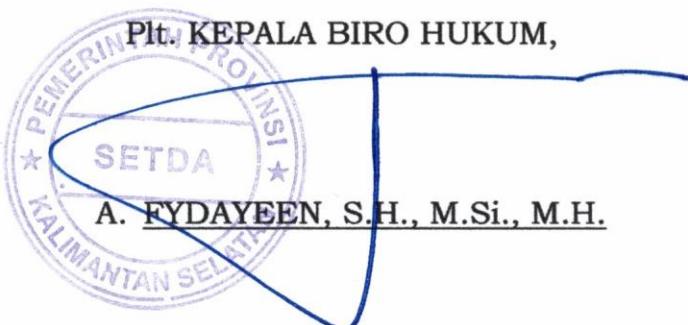
Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2023 NOMOR 64

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,  
SETDA  
A. FYDAYEEN, S.H., M.Si., M.H.



**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**  
**NOMOR 064 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN DAN RENCANA AKSI DAERAH**  
**PELAYANAN KEPEMUDAAN PROVINSI KALIMANTAN**  
**SELATAN TAHUN 2022-2026**

**MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN TAHUN 2022 - 2026**  
**DOMAIN PENDIDIKAN**

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/ BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2022)	TARGET				SKPD PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ RINCIAN OUTPUT (RO)			2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)
PROGRAM SINERGIS ANTAR SEKTOR DALAM HAL PENYADARAN PEMBERDAYAAN SERTA PENGEMBANGAN	Domain Pendidikan : 1. Rata-rata lama sekolah pemuda 2. Angka partisipasi kasar sekolah menengah pemuda 3. Angka partisipasi kasar perguruan tinggi		Proporsi Pemuda berusia 16 - 30 tahun yang dimulai dari pendidikan MTs, MA,	-	102.805	129.067	139.001	149.021	KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
			Proporsi Pemuda berusia 16 - 30 tahun yang dibentuk sebagai organisasi pemuda Kristen	-	50	60	70	80	
			Angka partisipasi kasar Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA)/ Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB)/ Sederajat	93,92	94,68	95,12	95,56	96,00	
	Bentuk Koordinasi : a. Peningkatan angka partisipasi Pemuda melalui pendidikan b. Peningkatan penyadaran Pemuda melalui pendidikan agama, pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara, kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi, dan karakter kebangsaan c. Peningkatan kemudahan akses pendidikan Pemuda yang murah dan berkualitas sampai dengan di pedesaan serta daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal		Jumlah Siswa Agama Buddha Yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi Siswa Pendidikan Agama dan Keagamaan Buddha	-	30 Siswa	40 Siswa	50 Siswa	60 Siswa	
			Jumlah Siswa Agama Buddha Yang Mendapatkan Pembinaan Literasi Keagamaan Bagi Siswa Pendidikan Agama dan Keagamaan Buddha	-	54 Siswa	60 Siswa	65 Siswa	70 Siswa	

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MADRASAH								KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	
		<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Peningkatan Upaya Moderasi beragama, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi  <i>Termasuk layanan kelembagaan (1.442 jumlah lembaga pendidikan madrasah/ra Se-Kalsel)</i>	Persentase Lembaga Pendidikan Islam; Persentase Lembaga Pendidikan Madrasah	199.094 siswa	199.800 siswa	200.094 siswa	220.098 siswa	250.097 siswa	
		<b>Kegiatan :</b> Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Sehat di Madrasah/ra Tingkat Daerah Provinsi  <i>Termasuk Layanan kesehatan yang diberikan 1.442 lembaga Se-Kalsel)</i>	Cakupan indikator PHBS	199.094 siswa	199.800 siswa	200.094 siswa	220.098 siswa	250.097 siswa	
		<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Penyelenggaraan Adiwiyata Satuan Pendidikan 2. Penyelenggara Satuan Pendidikan Ramah Anak  <i>Termasuk Layanan kelembagaan pendidikan di 1.442 lembaga</i>	Jumlah Media elektronik, dan lainnya	13 Media					
		<b>Kegiatan :</b> Pengembangan Pelaksanaan Guru dan Tenaga Pendidik  <i>Termasuk Layanan kelembagaan pendidikan di 1.442 lembaga</i>	Persentase	0,007%	1%	1,2%	1,5%	1,7%	
		<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA PENDIDIKAN</b>							
		<b>Kegiatan :</b> Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, Siswa, Guru dan Tenaga Pendidik  <i>Termasuk Layanan kelembagaan pendidikan di 1.442 lembaga</i>	Persentase daerah terpencil dan sangat terpencil yang dilakukan pelayanan pendidikan bergerak sesuai standar; Persentase lembaga	1442 lembaga	1442 lembaga	1444 lembaga	1450 lembaga	1470 lembaga	

		<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Pengembangan Pendampingan Pendidikan 2. Pengadaan Alat Sarana dan Prasarana Pendidikan 3. Pemeliharaan Alat Kesehatan/Koordinasi dengan layanan kesehatan setempat	Jumlah Pelayanan Kesehatan disatuan pendidikan; Jumlah lembaga satuan pendidikan; Jumlah Siswa disatuan pendidikan; Jumlah Guru dan Tenaga Pendidik disatuan Pendidikan	1 Kegiatan				
		<b>Kegiatan :</b> Satuan Pendidikan berprestasi  <i>Termasuk Layanan kelembagaan pendidikan di 1.442 lembaga</i>	Cakupan layanan pendidikan; Satuan pendidikan sehat; Satuan pendidikan ramah anak; Satuan pendidikan adiwiyata; Satuan pendidikan inklusi	1 Kegiatan				
		<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Pengelolaan mutu pendidikan madrasah  <i>Termasuk Layanan kelembagaan pendidikan di 1.442 lembaga</i>	Jumlah siswa dan lembaga akreditasi	199.094 siswa	199.800 siswa	200.094 siswa	220.098 siswa	250.097 siswa
			Persentase bagi lembaga pendidikan madrasah	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Pengelolaan satuan pendidikan Madrasah/ra  <i>Termasuk Layanan kelembagaan pendidikan di 1.442 lembaga</i>	Jumlah guru dan tenaga pendidik	20.907 orang	21.907 orang	22.907 orang	23.907 orang	24.907 orang
			Persentase Kab/Kota dengan jumlah pendidikan	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Kab/Kota dalam pendirian lembaga baru	70%	75%	80%	85%	90%
			Persentase Ketersediaan Sumber Daya dalam satuan pendidikan	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase satuan pendidikan yang terkena musibah	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Pengelolaan satuan pendidikan untuk mutu pendidikan	Persentase mutu pendidikan madrasah	85%	87%	89%	91%	93%

		PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN KRISTEN							KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	32%		
		<b>Sub Kegiatan :</b> Peningkatan Upaya Moderasi beragama, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi <i>Termasuk layanan kelembagaan pendidikan di 5 lembaga</i>		Percentase Lembaga Pendidikan Kristen; Percentase Lembaga Pendidikan Kristen ;		98 siswa	100 siswa	100 siswa	102 siswa	120 siswa		
		<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Penyelenggaraan Adiwiyata Satuan Pendidikan 2. Penyelenggara Satuan Pendidikan Ramah Anak <i>Termasuk Layanan kelembagaan pendidikan di 5 lembaga</i>		Jumlah Media elektronik dan lainnya		13 Media	13 Media	13 Media	13 Media	13 Media		
		<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA PENDIDIKAN</b>										
		<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Pengelolaan mutu pendidikan sekolah Kristen		Jumlah siswa dan lembaga akreditasi Termasuk Layanan kelembagaan pendidikan di 1.442 lembaga Percentase bagi lembaga pendidikan madrasah <i>Termasuk Layanan kelembagaan pendidikan di 5 lembaga</i>		199,094 siswa 100%	199,800 siswa 100%	200,094 siswa 100%	220,098 siswa 100%	250,097 siswa 100%		
		2. Pengelolaan satuan pendidikan Madrasah/ra <i>Termasuk Layanan kelembagaan pendidikan di 5 lembaga</i>		Percentase Kabupaten/kota dengan jumlah pendidikan Percentase kabupaten/kota dalam pendirian lembaga baru Percentase Ketersediaan Sumber Daya dalam satuan pendidikan Percentase satuan pendidikan yang terkena musibah		100% 70% 100% 100%	100% 75% 100% 100%	100% 80% 100% 100%	100% 85% 100% 100%	100% 90% 100% 100%		
		3. Pengelolaan satuan pendidikan untuk mutu pendidikan		Percentase mutu pendidikan Madrasah		85%	87%	89%	91%	93%		
		<b>PROGRAM KERUKUNAN UMAT DAN LAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA</b>										
		<b>Sub Kegiatan :</b> Event Keagamaan dan Seni Budaya Bernafaskan Agama Buddha		Penyelenggaraan Event Keagamaan Buddha		7 Orang	-	15 Orang	-	20 Orang		
		<b>Kegiatan :</b> Yobbana Dhamma Samaya		Pelaksanaan Yobbana Dhamma Samaya		7 Orang	-	15 Orang	-	20 Orang		

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN BIMAS BUDDHA								
		<b>Sub Kegiatan :</b> Siswa Agama Buddha yang mendapatkan pendidikan karakter dan kewarganegaraan	Jumlah Siswa Agama Buddha yang mendapatkan pendidikan karakter dan kewarganegaraan	-	169 Siswa	195 Siswa	210 Siswa	235 Siswa
		<b>Kegiatan :</b> Pelaksanaan Kegiatan Sippa Dhamma Samajja	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Kegiatan Sippa Dhamma Samajja	-	31 Siswa	35 Siswa	35 Siswa	35 Siswa
		<b>Kegiatan :</b> Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Moderasi Beragama Bagi Siswa Pendidikan Agama dan Keagamaan Buddha	Jumlah Siswa Agama Buddha Yang Mendapatkan Pembinaan Moderasi Beragama Bagi Siswa Pendidikan Agama dan Keagamaan Buddha	-	54 Siswa	60 Siswa	65 Siswa	70 Siswa
		<b>Kegiatan :</b> Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi Siswa Pendidikan Agama dan Keagamaan Buddha	Jumlah Siswa Agama Buddha Yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi Siswa Pendidikan Agama dan Keagamaan Buddha	-	30 Siswa	40 Siswa	50 Siswa	60 Siswa
		<b>Kegiatan :</b> Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Literasi Keagamaan Bagi Siswa Pendidikan Agama dan Keagamaan Buddha	Jumlah Siswa Agama Buddha Yang Mendapatkan Pembinaan Literasi Keagamaan Bagi Siswa Pendidikan Agama dan Keagamaan Buddha	-	54 Siswa	60 Siswa	65 Siswa	70 Siswa
		<b>Sub Kegiatan :</b> Guru Pendidikan Agama Buddha yang di tingkatkan Kompetensinya	Jumlah Guru Pendidikan Agama Buddha yang di tingkatkan Kompetensinya	-	89 Orang	90 Orang	95 Orang	100 Orang
		<b>Kegiatan :</b> Peningkatan Kompetensi Guru Pendidikan Agama Buddha	Jumlah Guru Agama Buddha Yang ditingkatkan Kompetensinya	-	39 Orang	40 Orang	45 Orang	50 Orang
		<b>Kegiatan :</b> Peningkatan Kompetensi Pendidik pada Satuan Pendidikan Keagamaan Non Formal	Jumlah Guru Pendidikan Agama dan Keagamaan Buddha yang ditingkatkan kompetensinya	-	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
		<b>Kegiatan :</b> Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						
		Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	2 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit

DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN

	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	6 Ruang	10 Ruang	16 Ruang	17 Ruang	18 Ruang
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	9 Ruang	11 Ruang	12 Ruang	13 Ruang
	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	5 Ruang	7 Ruang	16 Ruang	17 Ruang	18 Ruang
	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Ruang Laboratorium Fisika yang Telah Dibangun	12 Ruang	7 Ruang	16 Ruang	17 Ruang	18 Ruang
	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Dibangun	26 Ruang	4 Ruang	16 Ruang	17 Ruang	18 Ruang
	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun	2 Ruang	6 Ruang	16 Ruang	17 Ruang	18 Ruang
	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Ruang Laboratorium Bahasa yang Telah Dibangun	N/A	N/A	16 Ruang	17 Ruang	18 Ruang
	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	Jumlah Ruang Laboratorium IPA yang Telah Dibangun	N/A	N/A	16 Ruang	17 Ruang	18 Ruang
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	8 Ruang	16 Ruang	17 Ruang	18 Ruang
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	4 Ruang	16 Ruang	17 Ruang	18 Ruang
	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	N/A	N/A	16 Ruang	17 Ruang	18 Ruang
	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	N/A	2 Ruang	16 Unit	17 Unit	18 Unit
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	115 Unit	38 Unit	76 Unit	77 Unit	78 Unit
	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	N/A	N/A	11 Unit	12 Unit	13 Unit
	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	N/A	N/A	11 Unit	12 Unit	13 Unit
	Pembangunan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Dibangun	N/A	N/A	11 Ruang	12 Ruang	13 Ruang
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	13 Ruang	15 Ruang	16 Ruang	17 Ruang	18 Ruang
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	2 Ruang	16 Ruang	17 Ruang	18 Ruang

	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Jumlah Laboratorium Biologi yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	N/A	16 Ruang	17 Ruang	18 Ruang
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	1 Ruang	16 Ruang	17 Ruang	18 Ruang
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	1 Ruang	16 Ruang	17 Ruang	18 Ruang
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	N/A	16 Ruang	17 Ruang	18 Ruang
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	1 Ruang	16 Ruang	17 Ruang	18 Ruang
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA	Jumlah Laboratorium IPA yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	N/A	N/A	16 Ruang	17 Ruang	18 Ruang
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	N/A	N/A	16 Ruang	17 Ruang	18 Ruang
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpusatakan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	1 Ruang	16 Ruang	17 Ruang	18 Ruang
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	N/A	N/A	16 Ruang	17 Ruang	18 Ruang
	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	N/A	N/A	16 Unit	17 Unit	18 Unit
	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	8 Ruang	3 Ruang	16 Unit	17 Unit	18 Unit
	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi	N/A	N/A	16 Unit	17 Unit	18 Unit
	Rehabilitasi Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi	N/A	N/A	16 Unit	17 Unit	18 Unit
	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Direhabilitasi	N/A	N/A	16 Ruang	17 Ruang	18 Ruang
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	66 Paket	98 Paket	151 Paket	152 Paket	153 Paket
	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	N/A	N/A	121 Paket	122 Paket	123 Paket
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	N/A	N/A	151 Paket	152 Paket	153 Paket
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	N/A	662 Paket	902 Paket	903 Paket	905 Paket
	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	N/A	N/A	36 Unit	37 Unit	38 Unit
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	53 Paket	1 Paket	101 Paket	102 Paket	103 Paket

	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	N/A	N/A	16 Unit	17 Unit	18 Unit	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	N/A	N/A	16 Unit	17 Unit	18 Unit	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	N/A	288 Satuan Pendidikan	409 Satuan Pendidikan	410 Satuan Pendidikan	411 Satuan Pendidikan	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	N/A	203 Satuan Pendidikan	409 Satuan Pendidikan	410 Satuan Pendidikan	411 Satuan Pendidikan	
	<b>Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>			N/A	N/A			
	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	N/A	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	N/A	N/A	16 Ruang	17 Ruang	18 Ruang	
	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	20 Ruang	10 Ruang	16 Ruang	17 Ruang	18 Ruang	
	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	N/A	43 Ruang	16 Ruang	17 Ruang	18 Ruang	
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	N/A	N/A	16 Ruang	17 Ruang	18 Ruang	
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	N/A	N/A	16 Ruang	17 Ruang	18 Ruang	
	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	N/A	N/A	16 Ruang	17 Ruang	18 Ruang	
	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	N/A	N/A	16 Unit	17 Unit	18 Unit	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	16 Unit	55 Unit	91 Unit	92 Unit	93 Unit	
	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	N/A	N/A	16 Unit	17 Unit	18 Unit	
	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	N/A	N/A	16 Unit	17 Unit	18 Unit	
	Pembangunan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Dibangun	N/A	N/A	16 Ruang	17 Ruang	18 Ruang	
	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	2 Ruang	N/A	13 Ruang	14 Ruang	15 Ruang	
	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	N/A	N/A	13 Ruang	14 Ruang	15 Ruang	

	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	N/A	N/A	13 Ruang	14 Ruang	15 Ruang
	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	N/A	N/A	13 Ruang	14 Ruang	15 Ruang
	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	N/A	N/A	13 Ruang	14 Ruang	15 Ruang
	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi	N/A	N/A	13 Ruang	14 Ruang	15 Ruang
	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	N/A	N/A	13 Unit	14 Unit	15 Unit
	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	N/A	50 Unit	13 Unit	14 Unit	15 Unit
	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi	N/A	N/A	13 Unit	14 Unit	15 Unit
	Rehabilitasi Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi	N/A	N/A	13 Unit	14 Unit	15 Unit
	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Direhabilitasi	N/A	N/A	13 Ruang	14 Ruang	15 Ruang
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	133 Paket	65 Paket	301 Paket	302 Paket	303 Paket
	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	N/A	N/A	61 Paket	62 Paket	63 Paket
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia	63 Paket	1575 Paket	121 Paket	122 Paket	123 Paket
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	N/A	N/A	902 Paket	903 Paket	905 Paket
	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	N/A	N/A	16 Unit	17 Unit	18 Unit
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	104 Paket	327 Paket	121 Paket	122 Paket	123 Paket
	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	N/A	N/A	13 Unit	14 Unit	15 Unit
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	N/A	N/A	13 Unit	14 Unit	15 Unit
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	N/A	213 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	82 Satuan Pendidikan	83 Satuan Pendidikan

	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	N/A	130 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	82 Satuan Pendidikan	83 Satuan Pendidikan	
	<b>Kegiatan :</b> Pengelolaan Pendidikan Khusus		N/A	N/A				DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit	N/A	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	9 Ruang	N/A	13 Ruang	14 Ruang	15 Ruang	
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	4 Ruang	9 Ruang	10 Ruang	11 Ruang	
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	2 Ruang	9 Ruang	10 Ruang	11 Ruang	
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	1 Ruang	9 Ruang	10 Ruang	11 Ruang	
	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	N/A	N/A	9 Ruang	10 Ruang	11 Ruang	
	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	N/A	N/A	9 Unit	10 Unit	11 Unit	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	6 Unit	10 Unit	31 Unit	32 Unit	33 Unit	
	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	N/A	N/A	11 Unit	12 Unit	13 Unit	
	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	6 Unit	4 Unit	11 Unit	12 Unit	13 Unit	
	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	N/A	N/A	9 Ruang	10 Ruang	11 Ruang	
	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun	9 ruang	4 Ruang	7 Ruang	8 Ruang	9 Ruang	
	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun	N/A	N/A	7 Ruang	8 Ruang	9 Ruang	
	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun	N/A	N/A	7 Ruang	8 Ruang	9 Ruang	
	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun	N/A	N/A	7 Ruang	8 Ruang	9 Ruang	

	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun	N/A	N/A	7 Ruang	8 Ruang	9 Ruang
	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	N/A	N/A	11 Ruang	12 Ruang	13 Ruang
	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	N/A	N/A	11 Ruang	12 Ruang	13 Ruang
	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	N/A	N/A	11 Ruang	12 Ruang	13 Ruang
	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi	N/A	N/A	11 Ruang	12 Ruang	13 Ruang
	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	N/A	N/A	7 Unit	8 Unit	9 Unit
	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	N/A	3 Unit	11 Unit	12 Unit	13 Unit
	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi	N/A	N/A	16 Unit	17 Unit	18 Unit
	Rehabilitasi Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi	N/A	N/A	16 Unit	17 Unit	18 Unit
	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	N/A	N/A	9 Ruang	10 Ruang	11 Ruang
	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	N/A	N/A	11 Ruang	12 Ruang	13 Ruang
	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Direhabilitasi	N/A	N/A	13 Ruang	14 Ruang	15 Ruang
	Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Direhabilitasi	N/A	N/A	13 Ruang	14 Ruang	15 Ruang
	Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Direhabilitasi	N/A	N/A	13 Ruang	14 Ruang	15 Ruang
	Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Direhabilitasi	N/A	N/A	13 Ruang	14 Ruang	15 Ruang
	Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Direhabilitasi	N/A	N/A	13 Ruang	14 Ruang	15 Ruang
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	11 Paket	6 Paket	41 Paket	42 Paket	43 Paket

	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga yang Tersedia	N/A	N/A	21 Paket	22 Paket	23 Paket	
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	N/A	7 Paket	31 Paket	32 Paket	33 Paket	
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	N/A	925 Paket	501 Paket	502 Paket	503 Paket	
	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	N/A	N/A	26 Unit	27 Unit	28 Unit	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	62 Paket	6 Paket	401 Paket	402 Paket	403 Paket	
	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	N/A	N/A	16 Unit	17 Unit	18 Unit	
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	N/A	N/A	16 Unit	17 Unit	18 Unit	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	N/A	25 Satuan Pendidikan	31 Satuan Pendidikan	32 Satuan Pendidikan	33 Satuan Pendidikan	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	N/A	24 Satuan Pendidikan	26 Satuan Pendidikan	27 Satuan Pendidikan	28 Satuan Pendidikan	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>							<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	N/A	N/A	18 Laporan	21 Laporan	25 Laporan	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>							<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>
	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	N/A	5 Lembaga	5 Lembaga	6 Lembaga	7 Lembaga	
	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>							
	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pembinaan 4 Konsensus Dasar dan Pembentukan Gerakan Nasional Revolusi Mental aktif	67.02	67.03	67.04	67.05	67.06	

	<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.  2. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.  3. Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan  Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan  Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	0	800	1000	1100	1100		
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>								<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>
	<b>Kegiatan :</b> Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Percentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pilkada dan Percentase Penurunan Jumlah Konflik Berlatar Belakang Politik	68.60	71.40	72.82	74.28	75.77		

	<p><b>Sub Kegiatan :</b></p> <p>1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	<p>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	0	50	50	50	50	
	<p>2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	<p>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	0	500	500	575	600	
	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>							
	<p><b>Kegiatan :</b> Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi</p>	<p>Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</p>	100%	100%	100%	100%	100%	<b>DINAS SOSIAL</b>
	<p><b>Sub Kegiatan :</b> Pelayanan Dukungan Psikososial</p>	<p>Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi</p>	15.000 KK	15.500 KK	16.000 KK	16.500 KK	17.000 KK	
	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>							
	<p><b>Kegiatan :</b> Pelayanan Informasi Rawan Bencana</p>	<p>Peningkatan Pencegahan Dini Penanggulangan Bencana Alam</p>	100%	100%	100%	100%	100%	<b>BPBD</b>
	<p><b>Sub Kegiatan :</b> 1. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana.</p>	<p>Jumlah Orang dalam Kegiatan Pelatihan Pencegahan Mitigasi Bencana dengan sasaran siswa SMA/ SMK di daerah rawan bencana Provinsi Kalimantan Selatan</p>	50 Orang	150 Orang	175 Orang	200 Orang	225 Orang	

		2. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana).	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang terlibat dalam rangka sosialisasi alat Early Warning System, Peringatan Dini dan Evakuasi Mandiri di daerah Rawan Bencana Banjir Prov Kalsel yang telah Terpasang EWS	-	4 Kegiatan / 4 Organisasi	2 Kegiatan/ 2 Kegiatan	2 Kegiatan/ 2 Kegiatan	-
		<b>Kegiatan :</b> Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Percentase Penanganan Pra Bencana	100%	100%	100%	100%	100%
		<b>Sub Kegiatan :</b> Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang terlibat di pelatihan fasilitator Kegiatan Desa Tangguh Bencana dengan target tahunan 4 Kawasan di Provinsi Kalimantan Selatan	4 Kawasan/ 4 Organisasi	4 Kawasan/ 4 Organisasi	4 Kawasan/ 4 Organisasi	4 Kawasan/ 4 Organisasi	4 Kawasan/ 4 Organisasi

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 064 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN DAN RENCANA AKSI DAERAH  
PELAYANAN KEPEMUDAAN PROVINSI KALIMANTAN  
SELATAN TAHUN 2022-2026

**MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN TAHUN 2022 - 2026**

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/ BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2022)	TARGET				SKPD PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ RINCIAN OUTPUT (RO)			2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)				(6)
	Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja : 1. Pemuda wirausaha dan kesempatan kerja 2. Tingkat pengangguran terbuka pemuda  Bentuk Koordinasi : Peningkatan daya saing wirausaha pemuda		Persentase penduduk berusia 16 - 30 tahun yang bekerja dengan status berusaha sendiri	7,32%	7,41%	7,50%	7,58%	7,67%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan
			Persentase penduduk berusia 16 - 30 tahun yang bekerja dengan status berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap	1,98%	2,08%	2,17%	2,26%	2,36%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan
			Persentase penduduk berusia 16 - 30 tahun yang bekerja dengan status berusaha dengan dibantu buruh tetap	0,66%	0,76%	0,86%	0,95%	1,05%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan
			jenis pekerjaan kerah putih (tenaga profesional atau teknisi, kepemimpinan atau ketatalaksanaan, pejabat pelaksana, atau tenaga tata usaha) yang dibagi dengan jumlah pemuda berusia 16 - 30 tahun	10,45%	10,53%	10,61%	10,69%	10,78%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan
			Persentase jumlah pengangguran pemuda berusia 16 - 30 tahun terhadap jumlah angkatan kerja pemuda berusia 16 - 30 tahun	11,20%	11,01%	10,82%	10,62%	10,43%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>							
		<b>Kegiatan :</b> Penyediaan Sarana Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	N/A	3 Sub sektor	4 Sub sektor	4 Sub sektor	5 Sub Sektor	
		<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	

		2. Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		3. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	1 Laporan				
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>								
		<b>Kegiatan :</b> Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Percentase peningkatan SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang kompeten	N/A	10%	10%	10%	10%
		<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan yang Dikembangkan Kompetensinya	400 orang	300 orang	300 orang	300 orang	300 orang
		2. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	N/A	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang
		3. Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide ) Tingkat Lanjutan	N/A	30 Orang	30 orang	30 orang	30 orang
		4. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	80 orang	75 orang	75 orang	75 orang	75 orang
		5. Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)	N/A	4 orang	2 orang	2 orang	2 orang
		6. Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata	N/A	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
		7. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	30 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang
		8. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

DINAS PARIWISATA

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA									DIINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa 2. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD 3. Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Persentase penduduk berusia 16 - 30 tahun yang bekerja pada pemerintahan desa (perangkat desa, BPD) dan sebagai pengelola Bumdes yang dibagi dengan jumlah pemuda berusia 16 - 30 tahun	N/A	2%	3%	5%	6%	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN									
		<b>Kegiatan:</b> Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	1193 Orang	1740 Orang	1929 Orang	2094 Orang	2367 Orang	
		<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	1. Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya  2. Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam kegiatan kepeloporan pemuda	N/A	30 Orang	30 Orang	35 Orang	35 Orang	
				24 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	
		2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	1. Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya  2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan  3. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	N/A	420 Orang	429 Orang	438 Orang	447 Orang	
				30 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	
				100 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	
		3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	1. Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya  2. Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam kegiatan pemberdayaan kepemudaan  3. Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan iptek dan imtaq pemuda	N/A	1179 Orang	1300 Orang	1500 Orang	1700 Orang	
				500 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	
				450 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	

			4. Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan kreativitas pemuda	80 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
			5. Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan public speaking bagi pemuda	50 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	
		4. Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	1. Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi dan Diberikan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	N/A	41 Orang	95 Orang	41 Orang	95 Orang	
			2. Jumlah paskibraka dan tim pembina yang difasilitasi dalam peningkatan wawasan kepaskibrakaan	68 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	
			3. Jumlah paskibraka yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan paskibraka provinsi	39 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	
			4. Jumlah paskibraka yang difasilitasi mengikuti seleksi paskibraka provinsi dan nasional	39 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	
		5. Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	N/A	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
		6. Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	1. Jumlah Dokumen Penghargaan Pemuda Provinsi yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
			2. Jumlah pemuda yang difasilitasi mengikuti kegiatan kepemudaan ditingkat nasional	50 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	
		7. Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
		8. Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari Seluruh Kabupaten/Kota	N/A	70 Orang	75 Orang	80 Orang	90 Orang	
		<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>							
		<b>Kegiatan :</b> Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan yang berwirausaha	325	325	325	325	325	

		<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi  2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi  Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabupaten/Kota	2 Dokumen	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>				
<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>									
		<b>Kegiatan :</b> 1. Potensi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa		0	100%	100%	100%	100%	<b>BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>
		2. Kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai gerbang IKN		0	100%	100%	100%	100%	
		3. Indeks pel publik		0	100%	100%	100%	100%	
		4. Percepatan Pemekaran Kabupaten Kambantang Lima Kotabaru		0	100%	100%	100%	100%	
		5. Kajian Digitalisasi dan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Guna Mengakselerasi Produktivitas dan Stabilitas UMKM		0	100%	100%	100%	100%	
		6. Kajian Indeks Daya Saing Daerah di Kalimantan Selatan		0	100%	100%	100%	100%	
		7. Kajian pemanfaatan teknologi dan informasi dalam mendukung smart village (desa pintar)		0	100%	100%	100%	100%	
		8. Kajian Strategi Pengembangan Pertanian Pangan Lokal di Kalimantan Selatan		0	100%	100%	100%	100%	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>									
		<b>Kegiatan :</b> Pengelolaan E/Government di Lingkup Pemerintah Provinsi							<b>DIINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>
		<b>Sub Kegiatan :</b> Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sosialisasi Digitalisasi UMKM Pengusaha Muda		15	20	25	30	

		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN							DINAS KOPERASI DAN UMKM	
		<b>Kegiatan :</b> Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Persentase Koperasi dan Usaha Kecil yang mengikuti Pelatihan	37	37	45	52	52		
		<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM Perkoperasian yang memahami Pengetahuan Perkoperasian	60	150	180	210	210		
		2. Pelatihan Tata Kelola dan Manajemen Koperasi Modern		0	0	30 orang	60 orang	60 orang		
		3. Pelatihan Digitalisasi Koperasi		30 orang	30 orang	30 orang	60 orang	60 orang		
		<b>Sub Kegiatan :</b> Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM UMKM yang Memahami Pengetahuan Kewirausahaan dan Usaha Mikro Kecil							
		1. Pelatihan Desain dan Pengemasan Produk UKM		60 orang	30 orang	60 orang	60 orang	60 orang		
		2. Pelatihan Kemitraan Rantai Pasok		0	0	30 orang	30 orang	30 orang		
		4. Pelatihan Kewirausahaan bagi Wirausaha Pemula		30 orang						
		5. Pelatihan Branding dan Digital Marketing		30 orang						
		6. Pelatihan Digitalisasi Pencatatan dan Pelaporan Keuangan		30 orang						
		7. Pelatihan Pemasaran ecommerce		30 orang						
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI								
		<b>Kegiatan :</b> Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Persentase Koperasi Aktif	40	45	50	55	60		



		<b>Kegiatan :</b> Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase pencari kerja yang memiliki keterampilan berdasarkan klaster kompetensi	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
			Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	N/A	49,87 %	55,39 %	59,82 %	63,44 %
		<b>Sub Kegiatan :</b> Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari kerja yang lulus dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan kerja	10 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	N/A	20 orang	20 orang	40 orang	40 orang
		<b>Kegiatan :</b> Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Persentase penganggur yang dilatih	0,03 %	N/A	N/A	N/A	N/A
			Persentase Tenaga Kerja yang memiliki tingkat produktivitas yang baik	N/A	100%	100%	100%	100%
		<b>Sub Kegiatan :</b> Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang tingkat produktivitasnya tinggi dengan kompetensi yang dimiliki	80 orang	N/A	N/A	N/A	N/A
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	N/A	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
		<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>						
		<b>Kegiatan :</b> Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase wirausaha baru yang dilatih	100%	44,44 %	50%	57,14 %	62,5 %
		<b>Sub Kegiatan :</b> Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	220 orang	60 orang	120 orang	130 orang	150 orang
		<b>Kegiatan :</b> Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase angkatan kerja yang bekerja	95,26 %	95,45 %	95,63 %	95,80 %	95,95 %
		<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	4504 orang	4200 orang	5300 orang	4500 orang	4600 orang
		2. Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	N/A	N/A	50 orang	300 orang	400 orang
		<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>						
		<b>Kegiatan :</b> Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase pencari kerja yang memiliki keterampilan berdasarkan klaster kompetensi	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
			Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	N/A	49,87 %	55,39 %	59,82 %	63,44 %

DINAS TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI

		<b>Sub Kegiatan :</b> Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari kerja yang lulus dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan kerja	362 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI + BLK
		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	N/A	372	372	296 orang	296 orang		
		Persentase penganggur yang dilatih	0,03 %	N/A	N/A	N/A	N/A		
		Persentase Tenaga Kerja yang memiliki tingkat produktivitas yang baik	N/A	100%	100%	100%	100%		
		Jumlah tenaga kerja yang tingkat produktivitasnya tinggi dengan kompetensi yang dimiliki	80 orang	N/A	N/A	N/A	N/A		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	N/A	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		
		<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>							
		<b>Kegiatan :</b> Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase wirausaha baru yang dilatih	100%	44,44 %	50%	57,14 %	62,5 %	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI + BLK
		<b>Sub Kegiatan :</b> Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	220 orang	60 orang	120 orang	130 orang	150 orang	
		<b>Kegiatan :</b> Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase angkatan kerja yang bekerja	95,26 %	95,45 %	95,63 %	95,80 %	95,95 %	
		<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	4504 orang	4200 orang	5300 orang	4500 orang	4600 orang	
		2. Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	N/A	N/A	50 orang	300 orang	400 orang	

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

LAMPIRAN III  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 064 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN DAN RENCANA AKSI DAERAH  
PELAYANAN KEPEMUDAAN PROVINSI KALIMANTAN  
SELATAN TAHUN 2022-2026

## MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN TAHUN 2022 - 2026

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/ BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2022)	TARGET				SKPD PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ RINCIAN OUTPUT (RO)			2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)
	<b>Domain Partisipasi dan Kepemimpinan :</b> 1. Pastisipasi Pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan 2. Pastisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi 3. Pemuda berpendapatan dalam rapat kemasyarakatan  <b>Bentuk Koordinasi :</b> a. Peningkatan kualitas kesehatan pemuda b. Peningkatan partisipasi pemuda dalam pengembangan kepeloporan c. Peningkatan partisipasi pemuda dalam pengembangan kepemimpinan	Proporsi Pemuda berusia 16 - 30 tahun yang dibentuk sebagai organisasi	-	137 lembaga MA	137 lembaga MA	137 lembaga MA	137 lembaga MA	<b>KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN</b>	
			-	50	60	70	80		
		Persentase pemuda berusia 16 - 30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi yang memiliki keanggotaan, kepengurusan, dan aturan tertentu selain di tempat kerja dan sekolah dalam 3 bulan terakhir	25%	30%	45%	55%	75%		
			25%	30%	45%	55%	75%		
			25%	30%	45%	55%	75%		

		<b>Kegiatan :</b> Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah organisasi kepramukaan (kwarda) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	1 Kwarda	1 Kwarda	1 Kwarda	1 Kwarda	1 Kwarda
		<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan termanfaatkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
		2. Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	1. Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya  2. Jumlah Orang Yang Ikut Partisipasi Dalam Kegiatan Kepramukaan  3. Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas kepramukaan	N/A  100 Orang  100 Orang	2 Organisasi  120 Orang  120 Orang	2 Organisasi  150 Orang  150 Orang	2 Organisasi  160 Orang  160 Orang	2 Organisasi  180 Orang  180 Orang
		3. Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas	100 Orang	120 Orang	150 Orang	160 Orang	180 Orang
		4. Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi	Jumlah SDM Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	N/A	20 Orang	25 Orang	20 Orang	35 Orang
		5. Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	N/A	2 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	5 Laporan
		6. Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan	N/A	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit
		7. Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi yang terkelola dan termanfaatkan	N/A	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit
		8. Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	N/A	1 Organisasi	2 Organisasi	4 Organisasi	8 Organisasi
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>						
		<b>Kegiatan :</b> Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah atlit yang dibina pada SKO, PPLP dan PPLM	170 Orang	170 Orang	170 Orang	170 Orang	170 Orang

		<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta	1. Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	N/A	12 Unit	15 Unit	18 Unit	21 Unit	<b>DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>	
			2. Jumlah Atlet yang dibina di PPLDP dan PPLPM		144 Orang	N/A	N/A	N/A		
			3. Jumlah Atlet Yang Dibina di PPLP	26 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A		
		2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan	N/A	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit		
			2. Jumlah sarana dan prasarana Cabor Yang Difasilitasi		9 Unit	N/A	N/A	N/A		
		Kegiatan : Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	26 Event	30 Event	33 Event	36 Event	39 Event		
		<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi	1. Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Provinsi	N/A	44 Dokumen	44 Dokumen	44 Dokumen	44 Dokumen		
			2. Jumlah Atlet Berbakat Yang Terpilih Dari Penyelenggaraan POPDA		1000 Orang	N/A	N/A	N/A		
			3. Jumlah Cabor Menyelenggarakan Kejuaraan Provinsi Senior / Junior		20 Cabor	N/A	N/A	N/A		
			4. Jumlah event olahraga rekreasi yang dilaksanakan (Keg. Festival ASN Antar Kab/Kota)		2 Event	N/A	N/A	N/A		
			5. Jumlah event olahraga rekreasi yang dilaksanakan (Keg. Festival Bola Kaki dan Pelatihan Sepak Bola)		3 Event	N/A	N/A	N/A		
			6. Jumlah Event Olahraga Rekreasi Yang Dilaksanakan (Keg.Olahraga Massal dan Adventure		5 Event	N/A	N/A	N/A		
			7. Jumlah Masyarakat Usia Lansia Yang Difasilitasi Dalam Kegiatan		30 Event	N/A	N/A	N/A		
			8. Jumlah Orang Monitoring Pekan Olahraga Provinsi		72 Orang	N/A	N/A	N/A		

		9. Jumlah partisipasi pada event kejuaraan olahraga	10 Event	N/A	N/A	N/A	N/A	
		10. Jumlah Pelaksaan Pembinaan Dan Pengembangan Atlet Berprestasi	1 Kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	
	2. Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	1. Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	N/A	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	
		2. Jumlah atlet paralimpik yang mengikuti kejuaraan paralimpik ditingkat nasional	50 Atlet	N/A	N/A	N/A	N/A	
		3. Jumlah atlet yang mengikuti Pekan Olahraga Paralympic Pelajar Daerah (PEPARPEDA)	70 Atlet	N/A	N/A	N/A	N/A	
		4. Jumlah atlet yang mengikuti Special Olympic Indonesia (SOIna)	70 Atlet	N/A	N/A	N/A	N/A	
	3. Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event	1. Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event	N/A	350 Orang	500 Orang	350 Orang	350 Orang	
		2. Jumlah cabor yang mengikuti kejuaraan tingkat nasional Lainnya	15 Cabor	N/A	N/A	N/A	N/A	
		3. Jumlah cabor yang mengikuti Kejuaraan Tingkat nasional (POMNAS)	10 Cabor	N/A	N/A	N/A	N/A	
		4. jumlah cabor yang mengikuti kejuaraan tingkat nasional (POPNAS/PRA POPNAS)	8 Cabor	N/A	N/A	N/A	N/A	
	<b>Kegiatan :</b> Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi tingkat Nasional	Jumlah organisasi yang difasilitasi untuk membina dan mengembangkan olahraga	16 Organisasi	18 Organisasi	20 Organisasi	22 Organisasi	24 Organisasi	
	<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	N/A	70 Dokumen	75 Dokumen	80 Dokumen	90 Dokumen	
	2. Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1. Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science )	N/A	3 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	
		2. Jumlah peserta pelatih tenaga keolahragaan	60 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	
		3. Jumlah peserta training camp	60 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	



		<b>Kegiatan :</b> Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pembinaan 4 Konsensus Dasar dan Pembentukan Gerakan Nasional Revolusi Mental aktif	67.02	67.03	67.04	67.05	67.06	
		<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.  2. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan  Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0	800	1000	1100	1100	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>
		<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>							
		<b>Kegiatan :</b> Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pilkada dan Persentase Penurunan Jumlah Konflik Berlatar Belakang Politik	68.60	71.40	72.82	74.28	75.77	
		<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	0	50	50	50	50	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>

		2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	0	500	500	575	600	
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>									
		<b>Kegiatan :</b> Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
		<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.  2. Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat  3. Identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat	Jumlah pemuda yg mengikuti FGD / Sosialisasi / Bimtek / Rakor terkait peningkatan pemberdayaan masyarakat desa melalui Kegiatan Peningkatan Status Desa dan Percepatan Penanganan Stunting.  Jumlah pemuda berusia (16-30 tahun) yang termasuk dalam keanggotaan dan kepengurusan dalam lembaga kemasyarakatan desa (LKD) (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna),  Jumlah pengurus lembaga adat desa yang mengikuti BIMTEK	20 Orang	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>				
				10 desa	11 desa	15 desa	15 desa	15 desa	

	<p><b>Bentuk Koordinasi :</b></p> <p>a. Penguatan pemberdayaan pemuda melalui penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan terkait persoalan pemuda</p> <p>b. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian pemuda terkait kemiskinan, kekerasan, perundungan, narkotika, prikotropika, dan zat adiktif lainnya</p> <p>c. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian pemuda terkait persoalan pemuda meliputi seks bebas, human immunodeficiency virus/ acquired immunodeficiency syndrome, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, dan perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan</p>	<p>Jumlah kajian dan penelitian bersama tentang persoalan pemuda yang terlaksana dan dimanfaatkan</p>						
	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>							
	<p><b>Kegiatan :</b></p> <p>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</p>	<p>Persentase pembinaan 4 Konsensus Dasar dan Pembentukan Gerakan Nasional Revolusi Mental aktif</p>	67.02	67.03	67.04	67.05	67.06	
	<p><b>Sub Kegiatan :</b></p> <p>1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.</p> <p>2. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.</p> <p>3. Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.</p>	<p>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</p> <p>Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</p> <p>Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara</p>	0	800	1000	1100	1100	

		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>							<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>
		<b>Kegiatan :</b> Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100	100	100	100	100	
		<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah  2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di daerah  Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0	800	1000	1100	1100	
		<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>							
		<b>Kegiatan :</b> Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase penurunan potensi konflik dan Persentase penyelesaian konflik sosial	67.02	67.03	67.04	67.05	67.06	
		<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0	800	1000	1100	1100	

		2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0	13	13	13	13	
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>							
		<b>Kegiatan: Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi</b>	<b>Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda</b>	1193 Orang	1740 Orang	1929 Orang	2094 Orang	2367 Orang	
		Sub Kegiatan : 1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	1. Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	N/A	30 Orang	30 Orang	35 Orang	35 Orang	
			2. Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam kegiatan kepeloporan pemuda	24 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	
		2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	1. Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	N/A	420 Orang	429 Orang	438 Orang	447 Orang	
			2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	30 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	
			3. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	100 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	
		3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	1. Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	N/A	1179 Orang	1300 Orang	1500 Orang	1700 Orang	
			2. Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam kegiatan pemberdayaan kepemudaan	500 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	
			3. Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan iptek dan imtaq pemuda	450 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	
			4. Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan kreativitas pemuda	80 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	



		Sub Kegiatan : 1 2 3 dst...						
--	--	-----------------------------------------	--	--	--	--	--	--

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN  
 NOMOR 064 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN DAN RENCANA AKSI  
 DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN PROVINSI  
 KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2022-2026

**MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN TAHUN 2022 - 2026**

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/ BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2022)	TARGET				SKPD PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ RINCIAN OUTPUT (RO)			2023	2024	2025	2026	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	<b>Domain Kesehatan dan Kesejahteraan :</b> 1. Angka Kesakitan Pemuda 2. Pemuda korban kejahatan 3. Pemuda Merokok 4. Remaja perempuan sedang hamil  <b>Bentuk Koordinasi :</b> a. Peningkatan pelindungan pemuda terhadap pornografi dan pornoaksi, perilaku seks bebas, prostitusi, human immunodeficiency virus/ acquired		Persentase Pemuda berusia 16 - 30 tahun yang mendapatkan bantuan Indonesia Pintar	-	Total 38.253 , persentasi 98,058%	Total 38.253 , persentasi 98,058%	Total 38.253 , persentasi 98,058%	Total 38.253 , persentasi 98,058%	

	immunodeficiency syndrome, dan perdagangan manusia b. Peningkatan perlindungan pemuda terhadap ancaman penurunan kualitas moral dan konflik sosial c. Peningkatan pelindungan pemuda terhadap ancaman pengangguran dan kemiskinan d. Peningkatan pelindungan pemuda terhadap perilaku kekerasan baik fisik maupun mental e. Peningkatan pelindungan pemuda terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya f. Peningkatan pelindungan pemuda terhadap hal yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, pencegahan diskriminasi suku, agam, ras, gender, dan antar golongan untuk menjaga persatuan kesatuan bangsa g. Peningkatan pembinaan ideologi Pancasila sejak dini melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda h. Pelindungan Pemuda terkait dampak negatif perkembangan teknologi informasi	Percentase Pemuda berusia 16 - 30 tahun yang mendapatkan bantuan Indonesia Pintar untuk Pemuda Kristen	-	40	45	48	50	KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>								
	<b>Kegiatan :</b> Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Percentase pembinaan 4 Konsensus Dasar dan Pembentukan Gerakan Nasional Revolusi Mental aktif	67.02	67.03	67.04	67.05	67.06	
	<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.  2. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan  Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0	800	1000	1100	1100	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

		3. Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	0	13	13	13	13	
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>									
	<b>Kegiatan :</b> Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100	100	100	100	100	
	<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah  2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah  Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0	800	1000	1100	1100	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>
<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>									
	<b>Kegiatan :</b> Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Persentase penurunan potensi konflik dan Persentase penyelesaian konflik sosial	67.02	67.03	67.04	67.05	67.06	

		<p><b>Sub Kegiatan :</b></p> <p>1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p> <p>2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p>	<p>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</p> <p>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p>	0	800	1000	1100	1100	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>									
		<p><b>Sub Kegiatan :</b></p> <p>Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi</p>	<p>Percentase Posyandu Aktif; Percentase Puskesmas yang mempunyai Pangkalan Saka Bakti Husada ;</p> <p><i>Termasuk Layanan kesehatan yang diberikan (1.336.584 jlh pdd usia 16-30 tahun/ 32 % dari jlh penduduk Kalsel)</i></p>	58% 30%	62% 35%	68% 40%	74% 45%	60% 50%	1.336.584 (jlh Penduduk 16-30 tahun) 32%
		<p><b>Kegiatan :</b></p> <p>Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi</p>	<p>Cakupan indikator PHBS</p> <p><i>Termasuk Layanan kesehatan yang diberikan (1.336.584 jlh pdd usia 16-30 tahun/ 32 % dari jlh penduduk Kalsel)</i></p>	38%	43%	48%	53%	60%	
		<p><b>Sub Kegiatan :</b></p> <p>1. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat</p> <p>2. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat</p>	<p>Jumlah Media Promosi Kesehatan (Cetak, Elektronik dll)</p> <p><i>Termasuk Layanan kesehatan yang diberikan (1.336.584 jlh pdd usia 16-30 tahun/ 32 % dari jlh penduduk Kalsel)</i></p>	13 Media					

		<b>Kegiatan :</b> Pengembangan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) tingkat Daerah Provinsi	Persentase UKBM Aktif <i>Termasuk Layanan kesehatan yang diberikan (1.336.584 jlh pdd usia 16-30 tahun/ 32 % dari jlh penduduk Kalsel)</i>	25%	30%	35%	45%	50%
<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PER ORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>								
		<b>Kegiatan :</b> Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase daerah terpencil dan sangat terpencil yang dilakukan pelayanan kesehatan bergerak sesuai standar  Persentase puskesmas yang memiliki ketersediaan obat essensial  <i>Termasuk Layanan kesehatan yang diberikan (1.336.584 jlh pdd usia 16-30 tahun/ 32 % dari jlh penduduk Kalsel)</i>	14,89%	19,15%	23,40%	27,66%	31,91%
		<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)  2. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan  3. Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)  4. Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan  5. Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan  Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan  Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan  Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar  Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas  Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang	3 Layanan  26 Unit  N/A  N/A  N/A	3 Layanan  48 Unit  20 Paket  250 Unit  1 Unit	3 Layanan  50 Unit  20 Paket  250 Unit  2 Unit	3 Layanan  55 Unit  20 Paket  250 Unit  3 Unit	3 Layanan  58 Unit  20 Paket  250 Unit  4 Unit

		<b>Kegiatan :</b> Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM, dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (Treatment Coverage)  Indeks Keluarga Sehat (IKS)  Persentase Penurunan Jumlah Kematian Ibu <i>Termasuk Layanan kesehatan yang diberikan (652.088 jlh Pddk Perempuan usia 16-30 thn)</i>	1.1) 90%	1.1) 90%	1.1) 90%	1.1) 90%	1.1) 90%
		<b>Sub Kegiatan :</b> Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar <i>Termasuk Layanan kesehatan yang diberikan (1.336.584 jlh pdd usia 16-30 tahun/ 32 % dari jlh penduduk Kalsel)</i>	4.370.444 Orang	4.420.513 Orang	4.469.992 Orang	4.518.892 Orang	4.518.892 Orang
			Persentase Penanganan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi <i>Termasuk Layanan kesehatan yang diberikan (1.336.584 jlh pdd usia 16-30 tahun/ 32 % dari jlh penduduk Kalsel)</i>	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar <i>Termasuk Layanan kesehatan yang diberikan (1.336.584 jlh pdd usia 16-30 tahun/ 32 % dari jlh penduduk Kalsel)</i>	4.370.444 Orang	4.420.513 Orang	4.469.992 Orang	4.518.892 Orang	4.518.892 Orang
			Persentase Kabupaten/kota dengan System Kewaspadaan Dini KLB/Epidemi Kesehatan Sesuai Standard <i>Termasuk Layanan kesehatan yang diberikan (1.336.584 jlh pdd usia 16-30 tahun/ 32 % dari jlh penduduk Kalsel)</i>	100%	100%	100%	100%	100%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase kabupaten/kota yang merespon peringatan dini KLB (alert systems) minimal 80% <i>Termasuk Layanan kesehatan yang diberikan (1.336.584 jlh pdd usia 16-30 tahun/ 32 % dari jlh penduduk Kalsel)</i>	70%	75%	80%	85%	90%

			Persentase Ketersediaan Sumber Daya Kesehatan Penunjang Layanan KLB/Epidemi Kesehatan dan kedaruratan kesehatan Masyarakat <i>Termasuk Layanan kesehatan yang diberikan (1.336.584 jlh pdd usia 16-30 tahun/ 32 % dari jlh penduduk Kalsel)</i>	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang terdampak dan Berisiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) <i>Termasuk Layanan kesehatan yang diberikan (1.336.584 jlh pdd usia 16-30 tahun/ 32 % dari jlh penduduk Kalsel)</i>	100%	100%	100%	100%	100%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan <i>Termasuk Layanan kesehatan yang diberikan (652.088 jlh Pddk Perempuan usia 16-30 thn)</i>	85%	87%	89%	91%	93%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase fasyankes yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia produktif <i>Termasuk Layanan kesehatan yang diberikan (1.336.584 jlh pdd usia 16-30 tahun/ 32 % dari jlh penduduk Kalsel)</i>	84,60%	92,30%	92,30%	100%	100%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	persentase ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) <i>Termasuk Layanan kesehatan yang diberikan (652.088 jlh Pddk Perempuan usia 16-30 thn)</i>	14%	13,50%	12%	11%	10%
			Prevalensi anemia gizi pada ibu hamil <i>Termasuk Layanan kesehatan yang diberikan (652.088 jlh Pddk Perempuan usia 16-30 thn)</i>	20%	19%	18%	17%	16%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) <i>Termasuk Layanan kesehatan yang diberikan (1.336.584 jlh pdd usia 16-30 tahun/ 32 % dari jlh penduduk Kalsel)</i>	90%	93%	95%	98%	98%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Griya Sehat di Kab/Kota <i>Termasuk Layanan kesehatan yang diberikan (1.336.584 jlh pdd usia 16-30 tahun/ 32 % dari jlh penduduk Kalsel)</i>	1 Griya Sehat	1 Griya Sehat	2 Griya Sehat	2 Griya Sehat	3 Griya Sehat
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan deteksi dini penyakit kanker serviks di populasi usia 30-50 tahun (Targer lebih besar dari sama dengan 80%) <i>Termasuk Layanan kesehatan yang diberikan (652.088 jlh pdd Perempuan usia 16-30 tahun)</i>	30,5%	31%	31,50%	32%	32,50%

DINAS KESEHATAN

		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah kabupaten dengan puskesmas yang melaksanakan deteksi dini gangguan indera pada lebih besar dari sama dengan 40% populasi <i>Termasuk Layanan kesehatan yang diberikan (652.088 jlh pdd Perempuan usia 16-30 tahun)</i>	8 Kab/Kota	11 Kab/Kota	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota
			Percentase Kab/Kota dengan IR DBD <49/100.000 Penduduk; <b>Layanan kesehatan yang diberikan (1.336.584 jlh pdd usia 16-30 tahun/ 32 % dari jlh penduduk Kalsel )</b>	80%	85%	90%	90%	95%
			Percentase kabupaten/kota yang 50% puskesmasnya melaksanakan tatalaksana pneumonia sesuai standar <b>Layanan kesehatan yang diberikan (1.336.584 jlh pdd usia 16-30 tahun/ 32 % dari jlh penduduk Kalsel )</b>	75%	80%	85%	95%	100%
			Percentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan atau C pada populasi berisiko <b>Layanan kesehatan yang diberikan (1.336.584 jlh pdd usia 16-30 tahun/ 32 % dari jlh penduduk Kalsel )</b>	100%	100%	100%	100%	100%
			Percentase kabupaten/kota yang melakukan PPOM cacingan dengan cakupan lebih besar dari 75% dari sasaran minum obat <i>Termasuk Layanan kesehatan yang diberikan (1.336.584 jlh pdd usia 16-30 tahun/ 32 % dari jlh penduduk Kalsel )</i>	85%	85%	85%	85%	85%
			Percentase kabupaten/kota yang memiliki lebih besar dari sama dengan 20% Pukesmas rujukan Rabies Center (RC) <b>Termasuk Layanan kesehatan yang diberikan (1.336.584 jlh pdd usia 16-30 tahun/ 32 % dari jlh penduduk Kalsel )</b>	46,15%	53,84%	61,54%	69,23%	76,92%
			Percentase kasus kusta baru tanpa cacat <i>Termasuk Layanan kesehatan yang diberikan (1.336.584 jlh pdd usia 16-30 tahun/ 32 % dari jlh penduduk Kalsel )</i>	90%	90%	90%	90%	90%
			Percentase Kelompok Berisiko yang diperiksa HIV AIDS <b>Layanan kesehatan yang diberikan (1.336.584 jlh pdd usia 16-30 tahun/ 32 % dari jlh penduduk Kalsel )</b>	32%	35%	38%	41%	45%
			Percentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV <b>Layanan kesehatan yang diberikan (1.336.584 jlh pdd usia 16-30 tahun/ 32 % dari jlh penduduk Kalsel )</b>	73%	76%	79%	82%	85%

			Prevalensi obesitas pada penduduk umur $\geq 18$ Tahun <b>Layanan kesehatan yang diberikan (1.336.584 jlh pdd usia 16-30 tahun/ 32 % dari jlh penduduk Kalsel )</b>	15%	14%	13%	12%	11%	
			prevalensi tekanan darah tinggi <b>Layanan kesehatan yang diberikan (1.336.584 jlh pdd usia 16-30 tahun/ 32 % dari jlh penduduk Kalsel )</b>	31%	30%	29%	28%	27%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Persentase jemaah haji memperoleh perlindungan atau proteksi terhadap penyakit meningitis meningokokus sebelum keberangkatan <b>Layanan kesehatan yang diberikan (1.336.584 jlh pdd usia 16-30 tahun/ 32 % dari jlh penduduk Kalsel )</b>	100%	100%	100%	100%	100%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Presentase penderita depresi pada penduduk $\geq 15$ tahun yang mendapat layanan <b>Layanan kesehatan yang diberikan (1.336.584 jlh pdd usia 16-30 tahun/ 32 % dari jlh penduduk Kalsel )</b>	15%	20%	25%	30%	35%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Jumlah Kab/kota yang menerapkan KTR	5 Kab/Kota	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Rehabilitasi Medis <b>Layanan kesehatan yang diberikan (1.336.584 jlh pdd usia 16-30 tahun/ 32 % dari jlh penduduk Kalsel )</b>	1153 Orang	1166 Orang	1179 Orang	1192 Orang	1205 Orang	
			Persentase fasyankes yang melaksanakan deteksi dini Kesehatan Jiwa dan Penyalahgunaan Napza <b>Layanan kesehatan yang diberikan (1.336.584 jlh pdd usia 16-30 tahun/ 32 % dari jlh penduduk Kalsel )</b>	75%	76%	77%	78%	79%	
			Persentase Merokok Penduduk Usia 10-18 Tahun <b>Termasuk Layanan kesehatan yang diberikan (1.336.584 jlh pdd usia 16-30 tahun/ 32 % dari jlh penduduk Kalsel )</b>	4,40%	4,10%	3,80%	3,50%	3,20%	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan khusus <b>Termasuk Layanan kesehatan yang diberikan (1.336.584 jlh pdd usia 16-30 tahun/ 32 % dari jlh penduduk Kalsel )</b>	1000 orang	1000 orang	1000 orang	1000 orang	1000 orang	
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu yang diintegrasikan ke JKN mendapatkan pelayanan kesehatan <b>Termasuk Layanan kesehatan yang diberikan (1.336.584 jlh pdd usia 16-30 tahun/ 32 % dari jlh penduduk Kalsel )</b>	100%	100%	100%	100%	100%	

		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Kab/Kota yang melakukan PE < 24 jam <b>Termasuk Layanan kesehatan yang diberikan (1.336.584 jlh pdd usia 16-30 tahun/ 32 % dari jlh penduduk Kalsel )</b>	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase kasus Potensial KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <b>Termasuk Layanan kesehatan yang diberikan (1.336.584 jlh pdd usia 16-30 tahun/ 32 % dari jlh penduduk Kalsel )</b>	100%	100%	100%	100%	100%
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) <b>Termasuk Layanan kesehatan yang diberikan (1.336.584 jlh pdd usia 16-30 tahun/ 32 % dari jlh penduduk Kalsel )</b>	6	7	8	9	10
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Persentase Kab / Kota yang melaksanakan Respon Dini Pada Penyakit yang bisa menimbulkan Wabah <b>Termasuk Layanan kesehatan yang diberikan (1.336.584 jlh pdd usia 16-30 tahun/ 32 % dari jlh penduduk Kalsel )</b>	85%	90%	90%	90%	90%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas <b>Termasuk Layanan kesehatan yang diberikan (1.336.584 jlh pdd usia 16-30 tahun/ 32 % dari jlh penduduk Kalsel )</b>	900752 Keluarga	900759 Keluarga	918857 Keluarga	928046 Keluarga	937326 Keluarga
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>						
		<b>Kegiatan :</b> Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi						
		<b>Sub Kegiatan :</b> Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Pelindungan Pemuda terkait dampak negatif perkembangan teknologi informasi melalui kegiatan literasi digital bagi pemuda		15	20	25	30
		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>						

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

		<b>Kegiatan :</b> Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan yang Melibatkan pada Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Percentase kab/kota yang memiliki satgas TPPO yang aktif menindaklanjuti hasil Edukasi PHP	46%	54%	62%	69%	77%	
		<b>Sub Kegiatan :</b> 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi  2 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi  Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	7 Dokumen  10 Perangkat Daerah					
		<b>Kegiatan :</b> Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Percentase layanan informasi konsultasi kasus perempuan dan anak	100%	100%	100%	100%	100%	
		<b>Sub Kegiatan :</b> 1 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota  2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	1. Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat  2. Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	12 Orang  6 Layanan					
		<b>Kegiatan :</b> Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Percentase Lembaga yang menindaklanjuti Hasil Advokasi Penguatan Kelembagaan dalam PPA	80	80	80	80	80	



		<b>Kegiatan :</b> Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Gugus Tugas KLA Provinsi yang menindaklanjuti indikator penilaian KLA	75 Gugus Tugas	76 Gugus Tugas	78 Gugus Tugas	79 Gugus Tugas	81 Gugus Tugas	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>		
		<b>Sub Kegiatan :</b> Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	5 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen			
		<b>Kegiatan :</b> Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Forum Anak Kab/Kota yang terbentuk dan aktif sampai tingkat Desa	130 Forum Anak							
		<b>Sub Kegiatan :</b> 1 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi  2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi  3 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi  4 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi  Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi  Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi  Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	200 Orang							
		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>									
		<b>Kegiatan :</b> Pencengahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan pada pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kabupaten/kota yang memiliki PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) yang aktif (Minimal 2 PATBM aktif) melakukan pencegahan dan penanganan anak yang memerlukan perlindungan	38,36%	38,36%	53,84%	53,84%	53,84%			

		<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi  2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi  Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	30 Organisasi	30 Organisasi	20 Organisasi	20 Organisasi	20 Organisasi
		<b>Kegiatan :</b> Penyediaan Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Provinsi	Persentase peserta yang mengikuti edukasi yang lulus Post Test dengan nilai minimal 80	70%	70%	70%	70%	70%
		<b>Sub Kegiatan :</b> 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi  2 Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi  3 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi  Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi  Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Dokumen				
		<b>Kegiatan :</b> Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi dan Lintas daerah Kabupaten/ Kota	Persentase UPTD Provinsi/ Kab/Kota yang memiliki Indeks Kepuasan Masyarakat diatas 80	80%	80%	80%	80%	80%

		<b>Sub Kegiatan :</b> 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi  2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus  Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	2 Dokumen  1 Dokumen				
		<b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAPNARKOBA (P4GN)</b>						
		<b>Kegiatan :</b> Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Indeks Kepuasan Layanan klinik rehabilitasi BNNP	3,13 Indeks	3,16 Indeks	3,20 Indeks	3,20 Indeks	3,20 Indeks
		<b>Sub Kegiatan :</b> Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan	Jumlah Klien atau Pecandu yang direhabilitasi rawat jalan medis	50 Orang				

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

**LAMPIRAN V**  
**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**  
**NOMOR 064 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN DAN RENCANA AKSI DAERAH**  
**PELAYANAN KEPEMUDAAN PROVINSI KALIMANTAN**  
**SELATAN TAHUN 2022-2026**

**MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN TAHUN 2022 - 2026**

KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR	DOMAIN INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA/ BENTUK KOORDINASI		INDIKATOR	BASELINE (2022)	TARGET				SKPD PELAKSANA
	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ RINCIAN OUTPUT (RO)			2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)
	<b>Domain Gender dan Diskriminasi :</b> 1. Perkawinan usia anak 2. Pemuda perempuan sedang Sekolah Menengah dan Perguruan Tinggi 3. Pemuda perempuan bekerja di sektor formal		Persentase pemuda perempuan berusia 20 - 24 tahun yang saat perkawinan pertamanya berusia 18 tahun	10.53%	9.31%	8.12%	7.28%	6.10%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
			Persentase pemuda perempuan berusia 16 - 24 tahun yang sedang bersekolah di jenjang SMA/ Sederajat atau lebih tinggi	-	-	-	-	-	
	<b>Bentuk Koordinasi :</b> a. Peningkatan pelindungan pemuda terhadap pornografi dan pornoaksi, perilaku seks bebas, prostitusi, hiv, dan perdagangan manusia b. Peningkatan pelindungan pemuda terhadap ancaman penurunan kualitas moral dan konflik sosial c. Peningkatan pelindungan pemuda terhadap ancaman pengangguran dan kemiskinan d. Peningkatan pelindungan pemuda terhadap perilaku kekerasan baik fisik maupun mental e. Peningkatan pelindungan pemuda terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya f. Peningkatan pelindungan pemuda terhadap hal yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, pencegahan diskriminasi suku, agama, ras, gender dan antar golongan untuk menjaga persatuan kesatuan bangsa g. Peningkatan pembinaan ideologi Pancasila sejak dini melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda	Persentase pemuda perempuan berusia 16 - 30 tahun yang bekerja di sektor formal	-	-	-	-			
			Proporsi Pemuda berusia 16 - 30 tahun yang dimulai dari Penyuluhan Agama Islam	71	73	75	77	79	
			Proporsi Pemuda berusia 16 - 30 tahun yang dibentuk sebagai penyuluhan Agama dan Organisasi Masyarakat	71	73	75	77	79	KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



		<b>Kegiatan :</b> Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100	100	100	100	100
		<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah  2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah  Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0	800	1000	1100	1100
<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>								<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase penurunan potensi konflik dan Persentase penyelesaian konflik sosial	67.02	67.03	67.04	67.05	67.06
		<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah  2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan  Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0	800	1000	1100	1100
		<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA</b>		0	13	13	13	13

		<b>Kegiatan :</b> Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai kearifan budaya lokal							
		<b>Sub Kegiatan :</b> 1. penyusunan dan pemanfaatan grand design pembangunanana kependudukan (GDPK) tingkat provinsi 2. Advokasi dan Sosialisasi GDPK 3. Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA Jalur non formal dan informal padaormas pengelola kelompok kegiatan masyarakat 4. Penyusunan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan	Angka kelahiran remaja 15-19 thn (age specific fertility rate/ASFR)  Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)  Angka prevalensi kontrasepsi modern/moder contraceptive (mCPR)	33,97  54,19  71,65	36  61  72	35  61  74			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
		<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>							
		<b>Kegiatan :</b> Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan PPRG di seluruh SKPD	50%	55%	60%	65%	70%	

		<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi  2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi  3. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi  Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi  Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	2 Dokumen				
		<b>Kegiatan :</b> Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan yang berwirausaha	325	325	325	325	325
		<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi  2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi  Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Kepada Organisasi Masyarakat di Kabupaten/Kota	2 Dokumen				
		<b>Kegiatan :</b> Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Percentase Lembaga dan Perguruan Tinggi (PT) yang melaksanakan PUG	50%	50%	50%	50%	50%
		<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi  2. Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas  Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Tersedia	40 Lembaga				

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN								
		<b>Kegiatan :</b> Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan yang Melibatkan pada Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kab/kota yang memiliki satgas TPPO yang aktif menindaklanjuti hasil Edukasi PHP	46%	54%	62%	69%	77%
		<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi  2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	7 Dokumen				
		<b>Kegiatan :</b> Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase layanan informasi konsultasi kasus perempuan dan anak	100%	100%	100%	100%	100%
		<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota  2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	12 Orang				
		<b>Kegiatan :</b> Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Persentase Lembaga yang menindaklanjuti Hasil Advokasi Penguatan Kelembagaan dalam PPA	80	80	80	80	80

		<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik 2. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik  Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100 Orang	<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA</b>					
		<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>								
		<b>Kegiatan :</b> Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan tindak lanjut rencana aksi daerah dalam upaya pencegahan perkawinan anak	13 Kab/Kota						
		<b>Sub Kegiatan :</b> Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota  2 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota  Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi yang Tersedia	13 Perangkat Daerah						
		<b>Kegiatan :</b> Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang memberikan intervensi dalam peningkatan kualitas keluarga	13 Kab/Kota						
		<b>Sub Kegiatan :</b> Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	5 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen		
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>								
		<b>Kegiatan :</b> Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase SKPD Provinsi dan Kab/Kota yang melaporkan data lengkap	80%	80%	80%	80%	80%		



		<b>Kegiatan :</b> Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan pada pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kabupaten/kota yang memiliki PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) yang aktif (Minimal 2 PATBM aktif) melakukan pencegahan dan penanganan anak yang memerlukan perlindungan	38,36%	38,36%	53,84%	53,84%	53,84%	
		<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi  2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi  Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	30 Organisasi  3 Dokumen					
		<b>Kegiatan :</b> Penyediaan Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Provinsi	Persentase peserta yang mengikuti edukasi yang lulus Post Test dengan nilai minimal 80	70%	70%	70%	70%	70%	
		<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi  2. Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi  3. Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi  Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi  Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Dokumen  1 Dokumen  1 Dokumen					
		<b>Kegiatan :</b> Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi dan Lintas daerah Kabupaten/ Kota	Persentase UPTD Provinsi/ Kab/Kota yang memiliki Indeks Kepuasan Masyarakat diatas 80	80%	80%	80%	80%	80%	

		<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penguanan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 2 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguanan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 2 Dokumen				
		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>						
		<b>Kegiatan :</b> Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan pada pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kabupaten/kota yang memiliki PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) yang aktif (Minimal 2 PATBM aktif) melakukan pencegahan dan penanganan anak yang memerlukan perlindungan	38,36%	38,36%	53,84%	53,84%	53,84%
		<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi  Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	30 Organisasi				
		<b>Kegiatan :</b> Penyediaan Layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Provinsi	Persentase peserta yang mengikuti edukasi yang lulus Post Test dengan nilai minimal 80	70%	70%	70%	70%	70%

**DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK DAN  
KELUARGA BERENCANA**

		<b>Sub Kegiatan :</b> 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi  2 Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi  3 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi  Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi  Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Dokumen				
		<b>Kegiatan :</b> Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi dan Lintas daerah Kabupaten/ Kota	Persentase UPTD Provinsi/ Kab/Kota yang memiliki Indeks Kepuasan Masyarakat diatas 80	80%	80%	80%	80%	80%
		<b>Sub Kegiatan :</b> 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi  2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus  Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	2 Dokumen				
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>							
		<b>Kegiatan :</b> Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	1193 Orang	1740 Orang	1929 Orang	2094 Orang	2367 Orang
		<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi	1. Jumlah Pemuda Pelopor Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	N/A	50 Orang	60 Orang	60 Orang	75 Orang

		2. Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam kegiatan kepelopor pemuda	24 Orang	50 Orang	60 Orang	60 Orang	75 Orang	
	2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi	1. Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	N/A	420 Orang	429 Orang	438 Orang	447 Orang	
		2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	30 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	
		3. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	100 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	
	3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	1. Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	N/A	1179 Orang	1300 Orang	1500 Orang	1700 Orang	
		2. Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam kegiatan pemberdayaan kepemudaan	500 Orang	600 Orang	700 Orang	800 Orang	850 Orang	
		3. Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan iptek dan imtaq pemuda	450 Orang	450 Orang	500 Orang	600 Orang	650 Orang	
		4. Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan kreativitas pemuda	80 Orang	120 Orang	150 Orang	180 Orang	200 Orang	
		5. Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan public speaking bagi pemuda	50 Orang	60 Orang	75 Orang	90 Orang	110 Orang	
	4. Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	1. Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi dan Diberikan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	41 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	
		2. Jumlah paskibraka dan tim pembina yang difasilitasi dalam peningkatan wawasan kepaskibrakaan	68 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	
		3. Jumlah paskibraka yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan paskibraka provinsi	39 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	
		4. Jumlah paskibraka yang difasilitasi mengikuti seleksi paskibraka provinsi dan nasional	39 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	
	5. Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	N/A	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
	6. Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi	1. Jumlah Dokumen Penghargaan Pemuda Provinsi yang Berprestasi dan Menerima Penghargaan	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
		2. Jumlah pemuda yang difasilitasi mengikuti kegiatan kepemudaan ditingkat nasional	50 Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	
	7. Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

	8. Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan dari Seluruh Kabupaten/Kota	N/A	70 Orang	75 Orang	80 Orang	90 Orang	
	<b>Kegiatan :</b> Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	25 Orang	30 Orang	35 Orang	40 Orang	45 Orang	
	<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	N/A	20 Orang	24 Orang	28 Orang	32 Orang	
	2. Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	1. Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi 2. Jumlah OKP Yang Mendapatkan Bantuan Hibah Daerah 3. Jumlah organisasi kepemudaan dan olahraga yang difasilitasi dalam workshop penggunaan dana hibah 4. Jumlah Pelaksanaan Pertemuan Koordinasi Pengembangan Kepemudaan	N/A 9 OKP 25 OKP 1 Kali	17 Dokumen N/A N/A N/A	18 Dokumen N/A N/A N/A	20 Dokumen N/A N/A N/A	22 Dokumen N/A N/A N/A	

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR